

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAAN (SIMPEG) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

RUSLI TUANANY

Program Studi Administrasi Publik Universitas Pattimura, Ambon

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Personnel Management Information System (SIMPEG) at the Office of the Ministry of Religion of Central Maluku Regency and to find out what obstacles arise in implementing the SIMPEG.

This research is descriptive using a qualitative approach so that to support this research activity, data collection from informants is carried out. Data analysis is preceded by collecting and collecting data or information in the field, after that it is classified according to the type and group, then it is analyzed or interpreted qualitatively.

Based on the results of the analysis, it is known that the implementation of SIMPEG has made a major contribution to the implementation of the functions of the Ministry of Religion Office of Central Maluku Regency, but in implementing SIMPEG it can be said that it is not optimal, because it is still experiencing several obstacles and problems caused by several shortcomings in its implementation.

Keywords: *SIMPEG, Ministry of Religion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah serta mengetahui hambatan apa yang muncul dalam rangka mengimplementasikan SIMPEG tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan. Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterpretasikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan SIMPEG telah memberikan kontribusi yang besar bagi pelaksanaan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, namun dalam mengimplementasikan SIMPEG ini dapat dikatakan belum optimal, karena masih mengalami beberapa hambatan dan masalah yang disebabkan oleh beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *SIMPEG, Kementerian Agama*

PENDAHULUAN

Penggunaan informasi dalam suatu organisasi berfungsi sebagai suatu pertimbangan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang kemudian diterapkan dalam bentuk pelayanan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia yang tidak dapat memprediksi dampak dari suatu keputusan yang diambil. Oleh karena itu salah satu fungsi informasi adalah mengurangi ketidakpastian yang ada. Sesuai perkembangan zaman yang pesat tatacara penanganan suatu informasi menggunakan alat-alat bantu yang canggih seperti komputer dan alat pendukung lainnya, sehingga mempermudah proses penanganan informasi yang digunakan dalam kegiatan manajerial.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya

penggunaan internet telah membawa setiap individu dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi dengan menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Sehingga dalam kehidupan organisasi dituntut ketersediaan suatu sistem informasi dengan dukungan dari fasilitas komputer, data atau informasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap dan mampu sebagai hal utama dalam penerapan manajemen modern.

Adanya peningkatan beban kegiatan dan kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, cepat dan akurat, terpadu dan handal untuk seluruh tingkat manajemen di lingkungan organisasi yang bersangkutan serta untuk pertukaran

informasi lintas sektoral dari dan ke instansi maupun instansi yang ada, apabila tidak didukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal dengan menggunakan teknologi yang tepat guna, maka kebutuhan akan informasi yang akurat tersebut dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dijelaskan bahwa pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan

sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Salah satu perwujudan dari *E-Government* adalah dengan mengembangkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut setiap daerah lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, proses pemandirian ini sekaligus merupakan pemberdayaan bagi sumber daya manusia di daerah.

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

khususnya Pasal 34 (ayat 2), yakni perlu diselenggarakan dan dipelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pasal 3 (ayat 3) bahwa SIMPEG Kabupaten/ kota berkedudukan di Kabupaten/ Kota , yang pengelolanya secara fungsional dilaksanakan oleh bagian Kepegawaian Kabupaten/ Kota.

Secara umum , SIMPEG dapat meningkatkan kualitas SDM dengan penyediaan informasi yang akurat dan efisien sehingga pengambilan keputusan dapat secara obyektif dilakukan. Secara strategis, aplikasi SIMPEG merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan memelihara, memperkaya, dan menyediakan pengetahuan dibidang kepegawaian kepada pihak- pihak yang membutuhkan sebagai basis

pengambilan keputusan yang akurat pada saat yang tepat.

Dengan SIMPEG dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna, dan berhasil serta menentukan arah kebijakan tentang mekanisme, koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Pengelolaan SIMPEG dikatakan cepat, tepat dan sesuai waktu apabila dalam prosedur kerja berjalan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu cepat pada saat pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data atau informasi kepegawaian, dan dikatakan tepat apabila dalam pengisian formulir tidak terdapat kesalahan sesuai format yang disediakan sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan

menghasilkan data atau informasi yang benar dan tepat. Sedangkan sesuai waktu apabila ada permintaan data atau informasi kepegawaian baik dalam lingkup unit kerja maupun diluar unit kerja tersebut data atau informasi selalu tersedia dan siap sesuai kebutuhan dan waktu pemakaiannya.

Sebelum penerapan Simpeg, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah mempunyai permasalahan kegiatan yang kompleks seperti input data pegawai masih manual melalui media kertas. Dalam menginputkan data pegawai tersebut memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Penumpukan data pegawai dalam berkas kertas tidaklah efisien jika petugas ingin melakukan pengolahan data pegawai tersebut. Proses pencarian juga memerlukan waktu yang relatif lama.

Jika data pegawai mengalami kerusakan, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah akan kehilangan data pegawai. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah sangat membutuhkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu menangani permasalahan kompleks tersebut. Hal tersebut dikarenakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah merupakan sebuah instansi pemerintahan yang menangani administrasi kepegawaian pemerintah dimana data kepegawaian dalam satu kabupaten skalanya besar. Jika tidak ditangani secara komputerisasi dalam bentuk data digital, maka data-data tersebut akan menumpuk dan bisa terjadi banyak kesalahan didalamnya seperti susah nya proses manipulasi (*insert,*

update, delete) dan pencarian data yang memakan waktu yang cukup banyak sehingga dapat menghambat kegiatan yang lain. Permasalahan-permasalahan diatas dapat diatasi dengan adanya pemanfaatan dan penerapan TIK yaitu dengan melakukan pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepegawaian, telah membuat dan mengembangkan *website* <http://simpeg5.kemenag.go.id>.

Masyarakat maupun pegawai dapat mengakses alamat website

tersebut melalui beberapa fasilitas yang disediakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, salah satunya yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.
2. Hambatan apa yang muncul dalam rangka implementasi SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Manajemen

Menurut W. Kumorotomo dan S.A Margono (2004: 7) bahwa pada umumnya apabila orang

membicarakan tentang sistem informasi manajemen yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjang tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa:

“Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi

pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian” (Keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda).

Tujuan SIMPEG di lingkup pemerintahan:

- 1) Untuk mendukung Sistem Manajemen ASN yang rasional dan pengembangan SDM di aparaturnya Pemerintah.
- 2) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- 3) Menyediakan Informasi ASN yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian ASN.

- 4) Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama pembuatan laporan.

Manajemen Kepegawaian

Manajemen personal adalah manajemen yang mengkhususkan diri dalam bidang personalia atau dalam bidang kepegawaian, dimana merupakan suatu ilmu atau seni untuk melaksanakan antara lain *planning*, *organizing*, *controlling*, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, Manullang (2004: 14) menyatakan bahwa:

“Masing-masing istilah personalia, personel, atau kepegawaian Negara mengandung arti; keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu. Dengan demikian, manajemen personalia adalah

manajemen yang menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan pegawai di dalam organisasi.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Musanef (2003: 12), bahwa manajemen kepegawaian bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menitikberatkan pada usaha-usaha untuk: 1) Mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang cakap dan mampu bekerja menurut kebutuhan organisasi; 2) Menggerakkan mereka untuk tercapainya tujuan organisasi; dan 3) Memelihara dan mengembangkan kecakapan serta kemampuan pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya.

Implementasi Sistem

Tata Sutabri (2005: 289) yang menyatakan bahwa implementasi/penerapan merupakan kegiatan

memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja.

Sedangkan George M. Scott (2004: 558) menyatakan bahwa penerapan sistem adalah proses pemasangan sistem yang baru dirancang, termasuk semua perlengkapan dan perangkat lunak yang dibeli. Penerapan sistem sangat bergantung pada keterampilan teknis dimana biasanya merupakan kegiatan terstruktur.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sehingga penulis bisa mendapatkan data yang

objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Karyawan (SIMPEG) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.

Informan Penelitian

Informan yang dipilih yaitu :

1. Sekretaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.
2. Kepala Sub. Bidang Kepegawaian
3. Staf Pengolahan Data.
4. Administrator Simpeg
5. Operator Simpeg.

Jenis dan Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data dibedakan atas sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).

a. Data primer

Data primer tersebut berupa hasil wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder meliputi profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, literature terkait, hasil penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh dan

dianggap kredibel. (Sugiyono 2010:91).

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang SIMPEG Web di Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam hal ini telah meluncurkan sebuah

pemutakhiran sistem kepegawaian bernama SIMPEG 5, yang mana hal ini sebagai upaya update data secara mandiri oleh ASN sehingga terwujudnya data kepegawaian yang mutakhir dan terintegritas. Melalui SIMPEG 5.0, ASN akan diminta mengisi data-data secara mandiri. Mulai dari Pendidikan, jabatan, organisasi, dan sebagainya dengan mengunggah berkas-berkas yang telah dikonversi ke dalam bentuk pdf untuk selanjutnya diverifikasi oleh pihak urusan kepegawaian.



Gambar 1. Menu Simpeg 5

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah

SIMPEG pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah dikelola oleh Bidang Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pengolahan data dan informasi pegawai dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data pegawai, daftar urut kepangkatan, dan laporan kepegawaian.

Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua rencana kegiatan kepegawaian perlu ditunjang dengan data dan statistik pegawai. Oleh karenanya data dan statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai

kegiatan disegenap aspek kepegawaian. Kekeliruan, ketidakakuratan dan timbulnya berbagai bias dalam penyajian data dan statistik akan sangat berisiko bagi pengambil kebijakan dalam kepegawaian khususnya pada saat penyusunan anggaran belanja pegawai. Bidang Tata Usaha merupakan pusat data dalam proses pengolahan data telah menggunakan aplikasi SIMPEG sejak tahun 2014 dan dikembangkan pada tahun 2018.

Setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah diberikan hak untuk mengakses SIMPEG dalam membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya data dan informasi kepegawaian yang akurat sangat membantu penilaian pencapaian sasaran, penilaian kinerja dan sebagai rujukan perumusan

kebijakan implementasi program selanjutnya, oleh karena itu data yang akurat, terpercaya, objektif dan konsisten sangat diperlukan. Kunci keberhasilan ini terletak pada bagaimana metode pengumpulan data, manajemen data, keunggulan sumberdaya pengelolaannya (kompetensi personal) dan kelembagaan dan pengelolanya (eksistensi).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah melakukan penerapan SIMPEG dalam rangka pengembangan pengelolaan data kepegawaian yang dapat mempermudah proses pengumpulan, pendokumentasian, dan penggunaan data pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, maka data tentang pegawai pun harus lengkap, tepat, dan

akurat untuk digunakan dengan cepat dalam pengambilan keputusan tentang kepegawaian. Apabila data tentang pegawai tidak tepat atau tidak *valid*, maka pengambilan keputusan oleh pejabat yang berkepentingan pun akan menjadi tidak tepat.

Selain adanya permasalahan/kendala dalam pengelolaan data pegawai secara manual, penerapan SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah juga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam pengumpulan, penggunaan, dan manajemen data pegawai sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berkepentingan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan staf pengevaluasi Penyuluh Agama Seksi Bimas Kristen yang menyatakan bahwa

“pengelolaan manajemen kepegawaian sebelum adanya Simpeg adalah masih belum diatur dengan baik dalam hal perlu adanya regulasi yang harus dipahami oleh semua ASN sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam pengurusan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian masing-masing ASN” (wawancara 14 Juni 2021)

Hal ini ditambahkan pula oleh Pengelola Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah bahwa “kemajuan yang diperoleh dengan adanya implementasi Simpeg di Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah adalah memperoleh data yang cepat dan dapat melihat kesalahan pada data sebelumnya”. (wawancara 14 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat

disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah telah menggunakan SIMPEG dalam melaksanakan pengolahan data pegawai dengan menggunakan aplikasi tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Data yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan manfaatnya sangat dirasakan pegawai dalam bekerja mengolah data kepegawaian.

Beberapa indikator yang sangat penting dalam pengimplementasian Simpeg di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan SIMPEG

Dalam pelaksanaan sistem, persoalan pokok terutama tergantung pada personil atau pegawainya. Dengan cakupan pelayanan yang

banyak dan luas ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah harus dapat menghimpun informasi kepegawaian dari masing-masing unit kerja agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat, baik yang bersifat rutin maupun strategis. Maka dari itu, peran Sumber Daya Manusia (Pegawai) dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen merupakan unsur yang sangat sentral. Karena secanggih apapun teknologi yang diterapkan dalam sebuah instansi jika tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan, mengelola, dan mengembangkannya, maka dapat dipastikan tidak akan membawa hasil yang maksimal. Kesiapan SDM yang akan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

ini dapat menggambarkan kesuksesan pelaksanaan sistem selanjutnya.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah sendiri jumlah pegawai yang menangani SIMPEG berjumlah 12 orang yang terdiri dari seluruh pegawai di Bidang Tata Usaha dan pelaksana di tiap-tiap bidang yang bertugas untuk memperbarui (*update*) data SIMPEG sesuai dengan tugas yang dijalankan.

Menurut Pengelola Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah bahwa, “Jumlah pegawai yang menangani SIMPEG sudah mencukupi. Jika ada masalah dengan SIMPEG, sudah dapat diatasi sendiri, atau jika belum rekanan siap datang menanganinya” (Wawancara tanggal 14 Juni 2021).

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Maluku Tengah menyatakan: “Saya rasa jumlah pegawai yang melaksanakan SIMPEG sudah mencukupi, memang belum ada pelatihan khusus, namun kompetensi pegawai saya rasa sudah mencukupi untuk dapat melaksanakan SIMPEG dengan baik” (Wawancara tanggal 14 Juni 2021).

Berdasarkan hasil observasi, penanggungjawab SIMPEG di setiap unit kerja sudah mencukupi karena bobot pekerjaan SIMPEG tidak banyak, karena hanya sebatas mencari data saja terkait, misalnya terkait pengangkatan ASN dan CASN. Utamanya di bidang mutasi karena baru saja ada penambahan pegawai baru yang bertugas sebagai operator

computer. Pada bidang Diklat meskipun hanya satu orang tetapi sudah mencukupi, karena menggunakan tenaga pegawai yang ahli mengoperasikan SIMPEG dan tugasnya hanya *update* data saja.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kecukupan jumlah pegawai pelaksana SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah itu bersifat kontekstual karena pelaksanaan dan tugas-tugas yang dijalankan berbeda di masing-masing bidang.

Prosedur merupakan sekumpulan aturan yang dipakai dalam mewujudkan pemrosesan data dan menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Pelaksanaan prosedur ini penting untuk menjamin telah dilaluinya proses administrasi dan kelengkapan data yang dibutuhkan.

Perincian prosedur disini meliputi: a) prosedur kerja; b) prosedur kontrol.

2. Pelaksanaan Alur Kerja SIMPEG

Setelah mengetahui Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan prosedur yang dijalankan, untuk dapat menggambarkan pelaksanaan SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah dengan lebih jelas, di dalam pelaksanaan prosedur kerja yang telah disebutkan diatas, dapat dirinci adanya pelaksanaan alur kerja SIMPEG. Di dalam pembahasan ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian mengenai alur kerja sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang telah peneliti lakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah meliputi Sub Sistem Input, Sub Sistem Proses, dan SubSistem Output

Hambatan Implementasi SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah telah digunakan sejak tahun 2014 namun ada beberapa kendala dalam penerapannya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pengelola SIMPEG.

Menurut Pengelola Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, beberapa kendala dalam pengelolaan manajemen kepegawaian sebelum adanya SIMPEG adalah kurangnya informasi/ komunikasi yang baik , kurang adanya kesadaran ASN dalam pengusulan , serta wilayah kerja yang luas. (wawancara 15 Juni 2021).

Hal ini ditambahkan oleh staf pengevaluasi Penyuluh Agama Seksi Bimas Kristen bahwa kendala atau hambatan implementasi SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah adalah belum berjalannya secara optimal SOP dan penggunaan aplikasi SIMPEG serta kemampuan para pengelola kepegawaian yang masih perlu ditingkatkan. (wawancara 15 Juni 2021)

SIMPEG sangat berperan dalam menghasilkan output berupa informasi. Dengan penggunaan SIMPEG ini informasi dapat disajikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan data yang diinput dari seluruh unit kerja. Namun dalam proses pembuatan output tersebut masih beberapa kali terjadi masalah, masalah yang pernah muncul adalah terdapat data beberapa pegawai yang

tidak muncul. Hal ini disebabkan karena data dari unit kerja tidak lengkap dan tidak dikomunikasikan ke bidang pengembangan pegawai sejak awal, akibatnya ada data pegawai yang tidak muncul di SIMPEG, padahal sudah didesak waktu keluarnya output.

KESIMPULAN

Pelaksanaan SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa pengembangan SIMPEG telah dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan yang ada. Perubahan yang merupakan *progress* terbesar adalah validitas data SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah karena selain penjagaan secara otomatis di dalam program SIMPEG, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Maluku Tengah juga telah melakukan pemutakhiran data (pembaruan data). Dapat dikatakan pula saat ini tidak ada duplikasi data serta kesalahan data pegawai sudah jauh berkurang dibandingkan sebelum pengembangan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan SIMPEG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah antara lain:

- a. kurangnya informasi/ komunikasi yang baik ,
- b. kurang adanya kesadaran ASN dalam pengusulan
- c. wilayah kerja yang luas.
- d. masih kurangnya keterlibatan dan tingkat partisipasi pemakai terkait pembiasaan pegawai pada sistem baru.
- e. masih kurangnya pelatihan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pelaksanaan SIMPEG.
- f. Tidak ada prosedur kerja (SOP) terkait pengumpulan input data dapat menghambat pelaksanaan input data. Keberadaan prosedur kerja penting untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melaksanakan kegiatan.
- g. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan alur kerja sistem salah satunya juga muncul karena kurangnya konsistensi pemakai dengan sistem informasi yang baru, disamping masalah kuantitas pegawai yang masih terdapat rangkap jabatan di bidang-bidang tertentu.
- h. Dalam pelaksanaan alur kerja sistem juga terdapat hambatan yang disebabkan karena ketimpangan kondisi *hardware*, khususnya komputer dan printer yang ada di bidang-bidang yang menghambat pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah Zulkifli. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Insiyah, Roudlotul, 2015, Penerapan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai pada Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Universitas Brawijaya* , Vol 3. No 12, 2015
- Kadir, Abdul. 2002. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Kumorotomo, Wahyudi dkk. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manullang. 2004. *Management Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia Balai Aksara.
- Moekijat. 2001. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 2003. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nitisemo, Alex S. 2002. *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadat, Anuar, 2019, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, *Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 3, Mei 2019*, ISSN : 2598-3814 (Online), ISSN : 1410-4520 (Cetak) hal 200-2004,
- Scott, George M. 2004. *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto, M. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Thoha, Miftah. 2003. *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.